

DETERMINAN KARATERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Rolia Wahasusmiah¹

Politeknik Prasetiya Mandiri¹

Email: roliawahasusmiah@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut mencakup karakteristik pemerintah daerah, temuan hasil audit, opini audit, kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat (DAU), belanja modal, dan leverage. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh 38 provinsi sebagai sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial, sedangkan uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit, opini audit, tingkat kekayaan daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the factors that influence the performance of local governments. These factors include local government characteristics, audit findings, audit opinions, regional wealth (PAD), the level of dependence on the central government (DAU), capital expenditure, and leverage. The population in this study comprises all provincial governments in Indonesia in 2023. The sample was selected using a purposive sampling method, resulting in 38 provinces as research samples. The analytical technique employed is multiple linear regression to examine the effect of independent variables on the dependent variable. The t-test was used to assess partial effects, while the coefficient of determination measured the explanatory power of the independent variables on the dependent variable. The results of the study indicate that audit findings, audit opinion, regional wealth, dependence on the central government, and leverage do not significantly affect the performance of regional governments. However, capital expenditure has a negative effect on regional government performance.

Keywords: Regional Government Performance, Regional Government Characteristics, Audit Findings, Audit Opinion

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara melalui aparatur pemerintahan berkewajiban memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mengutamakan kepentingan publik, khususnya dalam sektor pelayanan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, saat ini Indonesia menghadapi kompleksitas permasalahan, termasuk keterlibatan sejumlah oknum penyelenggara negara dalam kasus hukum. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun. Sebanyak 8.116 permasalahan (51,8%) terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan potensi kerugian

daerah sebesar Rp17,33 triliun. Selain itu, BPK juga menemukan 7.020 permasalahan (44,8%) Kelemahan sistem pengendalian intern serta 538 permasalahan (3,4%) Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, dengan potensi kerugian sebesar Rp1,04 triliun. Kinerja pemerintah diartikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi

keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Keberadaan pemerintahan yang baik atau *good governance* yang selama ini sangat dihindaki oleh masyarakat masih jauh dari harapan, bahkan hanya khayalan. Konsep *good governance* timbul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan publik.

Opini audit menunjukkan tingkat kewajaran informasi keuangan atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Opini yang lebih baik mencerminkan kinerja keuangan daerah yang lebih optimal. Temuan audit, sebagaimana didefinisikan dalam ISO 9001, merupakan bagian dari proses audit yang menyampaikan informasi penting dari auditor kepada pengguna laporan keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai hubungan opini audit dengan kinerja pemerintah diantaranya Virgasari (2009) menemukan bahwa opini audit mempunyai hubungan dan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Konsisten dengan penelitian Budianto (2012) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian Pemda yang memperoleh opini audit yang baik cenderung mendapatkan skor kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemda yang memperoleh opini audit yang tidak baik.

Menurut ISO 9001, Temuan audit merupakan bagian dari suatu proses audit dimana bagian ini berisi pesan khusus, disampaikan oleh auditor kepada pembaca laporan keuangan. Nilai temuan yang besar mampu memberikan sinyal penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sudarsana (2013) bahwa temuan audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian Semakin besar nilai temuan audit suatu pemda maka akan semakin rendah skor kinerja penyelenggaraan pemda tersebut.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Marfiana (2013) yang menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah karena dalam pemberian opini audit, BPK hanya mempertimbangkan kewajaran laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar, bukan jumlah atau nominal dari data keuangan tersebut. Serta hasil dari penelitian Artha dan Basuki (2015) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena rekomendasi atas hasil pemeriksaan tersebut cepat ditindaklanjuti.

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel untuk merepresentasikan karakteristik pemerintah daerah, yang mengacu pada studi yang dilakukan oleh Ara dan Herwanti (2016). Variabel-variabel tersebut meliputi: (a) tingkat kekayaan daerah; (b) tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat; dan (c) belanja modal. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan proksi leverage sebagai bagian dari karakteristik pemerintah daerah. Leverage diartikan sebagai rasio antara utang terhadap modal, dan dalam konteks penelitian ini digunakan untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang masih jarang mengaitkan leverage dengan kinerja pemerintah daerah.

Mengembangkan penelitian Ara dan Herwanti (2016), peneliti menambahkan dua variabel tambahan, yakni opini audit dan leverage, ke dalam analisis karakteristik pemerintah daerah. Secara keseluruhan, terdapat enam variabel yang dianalisis, yaitu opini audit, temuan audit, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, belanja modal, dan leverage. Selain penambahan variabel, cakupan objek penelitian juga diperluas. Bila sebelumnya penelitian hanya difokuskan pada satu wilayah, yakni Pulau Sumba, maka dalam studi ini objek diperluas mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Perluasan ini dilakukan mengingat masih terbatasnya penelitian yang menggunakan cakupan seluruh provinsi dalam analisis kinerja pemerintah daerah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Teknik Pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga sampel dalam penelitian ini merupakan pemerintah daerah pada provinsi yang memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah provinsi tahun 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baik yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) ataupun Tidak Wajar (TW).

2. Laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023 untuk mendapatkan jumlah temuan audit.

3. Memiliki data lengkap yang diinginkan peneliti seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, dan leverage.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji asumsi klasik, perumusan

model *Moderated Regression Analysis* (MRA), koefisien determinasi, uji t, dan uji hipotesis.

$$KPD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 BM - LEVE + \beta_4 TEMUAN + \beta_5 OPINI + e$$

Keterangan:

KPD	: Kinerja Pemerintah Daerah
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	: Koefisien variabel independen
PAD	: Tingkat Kekayaan Daerah
DAU	: Tingkat Ketergantungan Pada Pusat
BM	: Belanja Modal
LEVE	: Leverage
OPINI	: Opini Audit
TEMUAN	: Temuan Audit
e	: Koefisien Error

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian regresi linear berganda ini dilakukan dengan kekayaan, ketergantungan, belanja modal dan leverage serta temuan dan opini.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier

Model	Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3,840	1,008		,001
	PAD	,121	,111	,192	,284
	DAU	-,268	,327	-,146	,421
	BM	-4,430	1,465	-,579	,006
	LEVE	3,381	2,146	,292	,128
	TEMUAN	,963	2,159	,080	,659
	OPINI	,021	,195	,017	,917

a. Dependent Variable: KAT_KPD

$$KPD = 3,840 + 0,121 PAD - 0,268 DAU - 4,430 BM + 3,381 LEVE + 0,963 TEMUAN + 0,021 OPINI + e$$

1. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,284 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Marfiana (2013) serta Artha dkk (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Arra dan Herwanti (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah

daerah.

Tingkat Kekayaan Daerah merupakan nilai perbandingan antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bertujuan untuk memberikan memberikan keluasaan kepala daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang mana PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Apabila dilihat dari laporan realisasi APBD tahun 2023, tidak menunjukkan bahwa semakin efektif keuangan daerah atau tingkat kekayaan pemerintah daerah akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Tidak ada keterkaitan antara tingkat keyaan daerah dengan kinerja pemerintah daerah ini dapat diterima karena mengingat besarnya porsi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Adapun faktor dugaan lain dari tidak berpengaruhnya PAD terhadap kinerja pemerintah daerah yaitu karena terlalu kecilnya tingkat kekayaan daerah sehingga membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengalokasikan PAD untuk pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk publik atau dengan kata lain pemerintah kesulitan dalam mengidentifikasi potensi dari sumber PAD ini.

2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,421 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil dalam studi ini sepadan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) dan Artha dkk. (2015), yang menyatakan bahwa derajat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tidak memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah daerah. Meskipun demikian, temuan ini bertentangan dengan penelitian oleh Sudarsana dan Raharjo (2013) serta Arra dan Herwanti (2016), yang menyimpulkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat justru berkontribusi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah merupakan perbandingan antara dana alokasi umum terhadap total pendapatan. Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah

terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada Dana Alokasi Umum yang (DAU) yang menyumbang lebih dari 60% pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan program dan rencana kerja daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka desentralisasi.

Apabila dilihat dari laporan realisasi APBD tahun 2023, tidak menunjukkan bahwa semakin efektif tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat diterima mengingat bahwa DAU yang dalam proposi penerimaan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan paling besar diduga lebih banyak untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kurang memadai. Masalah lainnya terkait adanya SILPA atau sisa anggaran pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran yang disebabkan karena tidak terserapnya anggaran belanja daerah sehingga walaupun anggaran telah disediakan namun tidak digunakan oleh satuan kerja pemerintah (SKPDD) yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hasil penelitian ini variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Dari hasil yang tidak signifikan ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kinerja pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia pada tahun penelitian.

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa belanja modal ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0,006 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriarsari (2012), yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan temuan Arra dan Herwanti (2016), yang menunjukkan bahwa belanja modal justru memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Belanja modal adalah perbandingan nilai belanja modal terhadap total realisasi belanja.

Belanja modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Pemerintah daerah mengalokasikan dana berupa anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Kondisi dimana masih rendahnya alokasi belanja modal dalam APBD Pemerintah provinsi di Indonesia mengakibatkan sarana dan prasarana publik yang tersedia kurang memadai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda adalah karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan pendapatan daerah tapi juga dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang sudah ditetapkan semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga hal tersebut berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Apabila dilihat dari laporan realisasi APBD tahun 2023, menunjukkan bahwa semakin besar belanja modal suatu daerah akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Karena semakin besar nilai belanja modal pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan pengelolaan belanja modal dipemerintah provinsi di Indonesia pada tahun penelitian belum fokus untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa *leverage* ditolak. Hasil pengujian menunjukkan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai signifikan 0.128 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Artha dkk (2015) yang menyatakan

bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi, tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Alasan lain yang berkaitan dengan pembiayaan eksternal yang berupa utang dalam suatu unit usaha mungkin dapat menjadi ukuran kemandirian karena dalam suatu unit usaha utang menjadi pendanaan yang patut diperhitungkan. Namun apabila leverage diterapkan dalam pemerintah daerah, posisi leverage tidak dapat disamakan pada kondisi dari suatu unit usaha karena pembiayaan eksternal pemerintahan daerah tidak hanya melalui utang tetapi juga berasal dari dana bantuan pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan.

Apabila dilihat dari laporan realisasi APBD tahun 2023, tidak menunjukkan bahwa semakin besar jumlah leverage akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat diterima mengingat beberapa pemda memiliki rasio yang kecil dikarenakan prosedur yang harus dilaksanakan untuk memperoleh pinjaman dari pihak eksternal terlalu rumit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah hanya sedikit menggunakan leverage sebagai sumber pendanaan dan itupun bukan untuk kegiatan operasional pemerintahan.

Penyataan ini didukung oleh Bastian (2005), sumber pembiayaan sektor publik mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta pendapatan sah lainnya. Dana-dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Di antara keempat sumber tersebut, pinjaman daerah merupakan pilihan terakhir karena PAD dan Dana Perimbangan tidak menimbulkan risiko tinggi, tidak menimbulkan beban bunga, serta tidak memerlukan pengembalian dana. Hal ini mengindikasikan bahwa leverage tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Dengan demikian, leverage tidak dapat dijadikan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam periode yang diteliti.

5. Pengaruh Temuan Audit terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa temuan audit ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

dengan nilai signifikan 0,659 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Artha dkk (2015) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Arra dan Herwanti (2016) yang menyatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Temuan audit adalah perbandingan antara temuan audit dalam rupiah terhadap total anggaran belanja. Temuan audit disini merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap pelanggaran atas ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Apabila dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK tahun 2023, tidak menunjukkan bahwa semakin banyaknya jumlah temuan akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Tidak ada keterkaitan antara temuan audit dengan kinerja pemerintah daerah yang mendapatkan jumlah temuan audit yang banyak belum tentu memiliki kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk. Pemerintah daerah dalam menjalankan kinerja pemerintahannya kurang dipengaruhi oleh hasil dari temuan audit. Pelaksanaan revisi maupun kritik saran dari BPK hanya sebatas pemenuhan kewajiban tanpa adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk melakukan kinerja dengan baik. Adapun dugaan lain menurut peneliti yang menjadi alasan mengapa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena temuan yang tidak material lebih banyak dibandingkan temuan yang material meskipun terdapat temuan yang sama dari beberapa tahun belakangan, belum tentu temuan tersebut material. Dalam hasil penelitian ini variabel temuan audit tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Hasil yang tidak signifikan ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel temuan audit tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kinerja pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia pada tahun penelitian.

6. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa opini audit ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

dengan nilai signifikan 0,917 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Opini merupakan nilai dari kewajaran yang diberikan oleh auditor terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan atas laporan keuangan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan. Opini auditor sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang berasal dari pihak eksternal, sehingga seringkali terdapat gejala di daerah terkesan memburu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika pemerintah daerah terlalu banyak mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), bahkan Tidak Wajar (TW) membuktikan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut tidak terlaksana dengan baik. Opini auditor menjadi pusat perhatian dalam setiap laporan kinerja suatu entitas dengan penalaran bahwa jika pemerintah daerah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) maka harapannya akan semakin bagus kinerja pemerintah daerah tersebut. Dilihat dari laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK pada tahun 2023, tidak menunjukkan bahwa semakin efektif opini audit yang didapatkan akan mempengaruhi baik buruknya kinerja pemerintah daerah. Ketidakterkaitan antara opini audit dan kinerja pemerintah daerah dikarenakan pemberian opini audit oleh BPK sebagai auditor pemerintah ini lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian internal, pemeriksaan akun-akun dan catatan akuntansi. Hal ini sejalan dengan Pemeriksaan audit keuangan lebih ditekankan pada kewajaran posisi keuangan, hasil operasi, arus kas dan lainnya. Pemberian opini audit disini bukan merupakan hasil pemeriksaan atas audit kinerja. Dari hasil yang tidak signifikan ini maka dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan baik tidaknya kinerja pemerintah daerah selama periode penelitian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah diperoleh nilai signifikan 0,284 > level of significant ($\alpha = 0,05$), karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU)

terhadap kinerja pemerintahan daerah diperoleh nilai signifikan 0,421 level of significant ($\alpha = 0,05$), karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal diperoleh nilai signifikan 0,006 < level of significant ($\alpha = 0,05$), karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* terhadap kinerja pemerintahan daerah diperoleh nilai signifikan 0,006 < level of significant ($\alpha = 0,05$), karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan terhadap kinerja pemerintahan daerah diperoleh nilai signifikan 0,659 > level of significant ($\alpha = 0,05$), karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit terhadap kinerja pemerintahan daerah diperoleh nilai signifikan 0,917 > level of significant ($\alpha = 0,05$), karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan efisiensi anggaran. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber pendapatan utama daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Serta menjadikan hasil audit opini dan temuan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja pemda, dengan melakukan tindak lanjut atas hasil audit tersebut.
2. pengamatan sebelumnya, sehingga hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Serta menggunakan variabel yang lebih variatif seperti rasio efektivitas, efisiensi, likuiditas, dan solvabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara, Samuel. Christian,. Herwanti, Titiek dan Pituringsih, Endar., (2016). Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Di Pulau Sumba. *Jurnal Akuntansi Universitas Mataram, Vol. 04, hal. 1-17.*
- Artha, Risma. Diri., Basuki, Prayitno dan MT, Alamsyah., (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB). *Jurnal InFestasi, Vol. 11, hal. 214- 229.*
- Bastian, Indra. (2005) Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Budianto, Wendy. (2012). Pengaruh opini, temuan audit, dan gender terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia 2008-2010. Skripsi Sarja. FEUI. Depok. www.ib.ui.ac.id/file?file=digital/20317234-S-Wendy%20Budianto.pdf
- Halim, A., (2008). *Akuntansi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumawardani, Media. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi UNNES. Semarang.
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: ANDI
- Marfiana, N., &Kurniasih, L. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Sustainable Kompetitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Mustikarini, Widya A., & Fitriasisari, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.
- Nordiawan, D. dan Ayuningtyas, H. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sudarsana, Hafidh. Susila. dan Rahardjo, Shiddiq. Nur., (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2, hal. 1-13.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Virgasari, Aviva. 2009. Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang